

Pendapatan Nasional Sebagai Indikator Kesejahteraan: Analisis Literatur Ekonomi Modern

Sandra Sulistio Wati¹, Hendra Riofita²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: sandrasulistiowati2303@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6598>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 25 Mei April 2026

Revised: 29 Mei 2026

Accepted: 15 Juni 2026

Kata Kunci

Pendapatan Nasional,
Kesejahteraan, Ekonomi
Modern, Indikator Ekonomi..

Keywords

National Income, Welfare,
Modern Economics,
Economic Indicators.



ABSTRACT

Pendapatan nasional merupakan indikator utama yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara. Namun, dalam perkembangan ekonomi modern, penggunaan indikator ini menuai berbagai kritik karena dinilai belum mampu menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendapatan nasional sebagai indikator kesejahteraan berdasarkan kajian literatur ekonomi modern. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai jurnal ilmiah dan buku ekonomi dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan nasional masih relevan sebagai indikator makroekonomi, namun memiliki keterbatasan karena tidak mencerminkan distribusi pendapatan, kualitas hidup, dan aspek lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensional dengan menggabungkan indikator lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Ratio, dan indikator kesejahteraan subjektif.

National income is one of the primary indicators used to measure a country's level of welfare. However, in modern economic development, criticism has emerged regarding its use, as it is considered insufficient to comprehensively reflect societal well-being. This study aims to analyze the role of national income as a welfare indicator based on modern economic literature. The method used is a literature review by examining various recent economic journals and books. The results indicate that national income remains relevant as a macroeconomic indicator but needs to be complemented with other indicators such as the Human Development Index (HDI), income distribution, and subjective well-being indicators. Therefore, measuring societal welfare must be conducted multidimensionally.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite Sandra Sulistio Wati et al (2026) Pendapatan Nasional Sebagai Indikator Kesejahteraan: Analisis Literatur Ekonomi Modern <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6598>

PENDAHULUAN

Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator utama dalam analisis ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi suatu negara. Indikator ini mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu dan sering dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam praktiknya, peningkatan pendapatan nasional umumnya diartikan sebagai adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat karena meningkatnya pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat (Hidayat & Woyanti1, 2021). Oleh karena itu, pendapatan nasional menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional.

Namun demikian, dalam perkembangan ekonomi modern, penggunaan pendapatan nasional sebagai indikator kesejahteraan mulai mendapatkan berbagai kritik. Pendapatan nasional dinilai belum mampu mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Endrawati et al., 2023).

Hal ini disebabkan karena indikator tersebut hanya berfokus pada aspek kuantitatif ekonomi tanpa mempertimbangkan distribusi pendapatan, kualitas hidup, serta aspek sosial dan lingkungan (Riofita, 2018). Dalam kenyataannya, suatu negara dapat memiliki tingkat pendapatan nasional yang tinggi, tetapi masih menghadapi berbagai permasalahan seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan rendahnya kualitas hidup masyarakat (Dieda et al., 2023).

Lebih lanjut, berbagai fenomena ekonomi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kesejahteraan yang merata. Ketimpangan distribusi pendapatan sering kali menyebabkan hasil pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, sementara kelompok lainnya tetap berada dalam kondisi ekonomi yang kurang sejahtera (Riofita, 2024b). Selain itu, aktivitas ekonomi yang mendorong peningkatan pendapatan nasional juga sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang (Azizaha, 2022).

Dalam konteks ekonomi modern, kesejahteraan tidak lagi dipandang hanya dari aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan (Riofita, 2024a). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Berbagai indikator alternatif mulai dikembangkan untuk melengkapi peran pendapatan nasional, seperti indeks pembangunan manusia, indikator ketimpangan pendapatan, serta indikator keberlanjutan pembangunan (Suparlan & Khotmi, 2010). Pendekatan ini menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat harus dilihat secara multidimensional, tidak hanya dari besarnya pendapatan yang dihasilkan suatu negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai peran pendapatan nasional sebagai indikator kesejahteraan dalam perspektif ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelebihan dan keterbatasan pendapatan nasional dalam mengukur kesejahteraan masyarakat serta mengkaji berbagai indikator alternatif yang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam memahami konsep kesejahteraan secara lebih luas, serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku ekonomi, serta laporan lembaga internasional seperti World Bank dan UNDP.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran database akademik seperti Google Scholar dan portal jurnal nasional. Literatur yang dipilih difokuskan pada publikasi lima tahun terakhir agar tetap relevan.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan mensintesis berbagai temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pendapatan nasional dan kesejahteraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pendapatan Nasional dalam Mengukur Kesejahteraan

Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator utama dalam analisis ekonomi makro yang digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi suatu negara. Indikator ini mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu, sehingga sering dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam praktiknya, peningkatan pendapatan nasional umumnya diartikan sebagai adanya peningkatan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Dalam perspektif ekonomi klasik dan neoklasik, pendapatan nasional dianggap memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan output nasional diyakini akan meningkatkan pendapatan per kapita, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya daya beli, masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap barang dan jasa, sehingga secara teoritis kesejahteraan juga meningkat.

Selain itu, pendapatan nasional juga digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah menggunakan data pendapatan nasional untuk menentukan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, serta strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pendapatan nasional tidak hanya berfungsi sebagai indikator statistik, tetapi juga sebagai alat perencanaan ekonomi yang strategis.

Namun, dalam konteks ekonomi modern, pemahaman mengenai kesejahteraan tidak lagi bersifat sempit dan hanya berfokus pada aspek pendapatan. Kesejahteraan dipandang sebagai konsep yang lebih luas, mencakup dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan (Dieda et al., 2023). Oleh karena itu, meskipun pendapatan nasional tetap relevan, penggunaannya sebagai indikator kesejahteraan perlu dikaji secara lebih kritis.

2. Keterbatasan Pendapatan Nasional

Meskipun pendapatan nasional memiliki peran penting dalam mengukur kinerja ekonomi, indikator ini memiliki berbagai keterbatasan yang menyebabkan ketidakmampuannya dalam menggambarkan kesejahteraan secara komprehensif. Salah satu keterbatasan utama adalah ketidakmampuannya dalam mencerminkan distribusi pendapatan. Pendapatan nasional yang tinggi tidak menjamin bahwa pendapatan tersebut didistribusikan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi justru disertai dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan, di mana sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar kekayaan.

Selain itu, pendapatan nasional juga tidak memperhitungkan aktivitas ekonomi di sektor informal. Di negara berkembang seperti Indonesia, sektor informal memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, namun sering kali tidak tercatat secara akurat dalam perhitungan pendapatan nasional. Hal ini menyebabkan nilai pendapatan nasional menjadi kurang mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Keterbatasan lainnya adalah ketidakmampuan pendapatan nasional dalam mengukur kualitas hidup masyarakat. Pendapatan nasional hanya berfokus pada aspek kuantitatif produksi dan pendapatan, tanpa memperhatikan aspek kualitatif seperti tingkat pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kebahagiaan masyarakat (Maharani et al., 2025). Padahal, faktor-faktor tersebut memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan yang sesungguhnya.

Lebih lanjut, pendapatan nasional juga tidak mempertimbangkan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Peningkatan produksi yang tercermin dalam pendapatan nasional sering kali disertai dengan eksploitasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dan mengancam keberlanjutan pembangunan (Endrawati et al., 2023). Oleh karena itu, penggunaan pendapatan nasional sebagai indikator kesejahteraan perlu dilengkapi dengan indikator lain yang mampu menangkap aspek-aspek tersebut.

3. Pendekatan Multidimensional dalam Ekonomi Modern

Seiring dengan perkembangan ilmu ekonomi, muncul pendekatan baru yang menekankan pentingnya pengukuran kesejahteraan secara multidimensional. Pendekatan ini mengakui bahwa kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang memengaruhi kualitas hidup manusia.

Salah satu indikator yang широко digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukur kesejahteraan berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IPM memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesejahteraan dibandingkan pendapatan nasional semata.

Selain itu, Gini Ratio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu negara. Indikator ini penting karena kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi juga oleh bagaimana pendapatan tersebut didistribusikan di masyarakat.

Konsep Gross National Happiness (GNH) juga menjadi alternatif dalam mengukur kesejahteraan dengan memasukkan aspek kebahagiaan dan kepuasan hidup masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama pembangunan bukan hanya peningkatan pendapatan, tetapi juga peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

Di tingkat global, Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi kerangka kerja yang komprehensif dalam mengukur kesejahteraan. SDGs mencakup berbagai aspek seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan (Maharani et al., 2025). Dengan demikian, pendekatan multidimensional memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai kesejahteraan masyarakat.

4. Implikasi terhadap Kebijakan Ekonomi

Temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendapatan nasional sebagai satu-satunya indikator dalam perumusan kebijakan ekonomi tidak lagi memadai. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai indikator kesejahteraan lainnya.

Dalam konteks kebijakan fiskal, pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam pendapatan nasional diikuti oleh pemerataan pendapatan. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan pajak progresif, subsidi, dan program perlindungan sosial (Suparlan & Khotmi, 2010). Dengan demikian, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, kebijakan pembangunan juga harus memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, aspek lingkungan juga perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ekonomi. Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif dalam jangka panjang (Syah, 2022). Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan perlu diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi nasional.

Dengan demikian, kebijakan pembangunan harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Pendapatan nasional merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja ekonomi suatu negara karena mampu memberikan gambaran mengenai tingkat produksi, pertumbuhan ekonomi, serta kapasitas ekonomi secara makro. Namun, dalam perspektif ekonomi modern, pendapatan nasional memiliki keterbatasan dalam mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Indikator ini tidak mampu menggambarkan distribusi pendapatan, kualitas hidup, serta dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, tingginya pendapatan nasional tidak selalu menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat telah tercapai secara merata.

Dalam perkembangan ekonomi modern, pengukuran kesejahteraan perlu dilakukan secara multidimensional dengan mempertimbangkan berbagai indikator lain seperti Indeks Pembangunan Manusia, tingkat ketimpangan pendapatan, serta aspek sosial dan lingkungan. Implikasinya, pemerintah perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizaha, M. (2022). Analysis of the Effect of the Gini Ratio, Percentage of Poor Population, GRDP, HDI, and Average Per Capita Expenditures on Development Inclusivity Index in Java Island. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(02), 98–112.
- Dieda, D., Azzahra, G., Desmawan, D., Pembangunan, I. E., Ekonomi, F., & Tirtayasa, S. A. (2023). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di 34 Provinsi Indonesia*. 7, 22034–22044.
- Endrawati, D., Nujum, S., & Selong, A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia 2017-2022. *Jurnal Pendidikan*

- Tambusa*, 7(3), 20144–20151.
- Hidayat, S., & Woyanti, N. (2021). PENGARUH PDRB PER KAPITA, BELANJA DAERAH, RASIO KETERGANTUNGAN, KEMISKINAN, DAN TEKNOLOGI TERHADAP IPM DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, 23(4), 122–137.
- Maharani, A., LiLa, Raihan, A. F., Hidayatullah, M. R., & Putra, A. R. (2025). Analisis Kesejahteraan dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Terhadap Tingkat Pengangguran di Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Mirai Management*, 10(1), 514–526.
- Riofita, H. (2018). Analisis Pelayanan Prima dan Kualitas Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. *JPEKA*, 2(1), 29–48.
- Riofita, H. (2024a). Optimalisasi Platform Digital Sebagai Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan UMKM. *Inovasi Makro Ekonomi (IME)*, 6(3).
- Riofita, H. (2024b). Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend Sharia Fintech. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2), 137–151. <https://doi.org/10.52813/jei.v13i2.353>
- Suparlan, & Khotmi, H. (2010). ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN, GINI RASIO, DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI INDONESIA. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar*, 5(4), 1894–1905.
- Syah, A. F. (2022). National Income Towards Equity Through Green Economy (Gini Comparative Analysis of Urban and Rural Ratios). *JBPE Journal of Business and Political Economy*, 4(June), 1–11.